



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JUNAEDI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 169468

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.700.000.000**

1. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/600 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **208.000.000**

1. MOBIL, CHEROKEE JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **103.750.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	418.588.947
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.430.338.947
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.430.338.947

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.